

# Benarkah Politisi Perempuan Lebih Rentan Terjerat Kasus Korupsi

PERUBAHAN di bidang sosial dan ekonomi yang dialami Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir telah berdampak pada semakin meluasnya peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan telah banyak menduduki jabatan strategis di berbagai bidang. Sekarang tinggal perempuan itu sendiri apakah mau memanfaatkan dengan baik ruang yang sudah terbuka itu ataukah sebaliknya.



Jabatan strategis memang memberi ruang yang luas untuk melakukan atau terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh tatanan hukum yang ada, salah satunya adalah melakukan tindak pidana korupsi. Dapat dicatat nama-nama seperti Wa Ode Nurhayati (Fraksi PAN) yang diduga terlibat kasus pembangunan infrastruktur daerah, Angelina Sondakh (Fraksi Demokrat) yang diduga terlibat kasus pembangunan Wisma Atlet Sea Games.

Kasus Wisma Atlet yang menyeret Angelina Sondakh sebagai tersangka juga menyeret dua perempuan yang berperan penting, yaitu Rosalina Manulang dan Yulianis yang menjadi terdakwa sekaligus saksi.

Ada berbagai pendapat mengapa politisi perempuan rentan terjerat kasus korupsi. Salah satunya dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Sri Budhi Eko Wardhani yang mengatakan bahwa perempuan masih awam dan belum matang dalam soal politik apabila dibandingkan dengan laki-laki. Ini mengingat keterlibatan perempuan dalam dunia politik baru 10 tahun terakhir.

Sehubungan dengan hal ini, maraknya kaum perempuan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi akhir-akhir ini seharusnya menjadi refleksi terutama bagi politisi perempuan itu sendiri.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar meliputi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan kondisi yang mendukung munculnya korupsi adalah kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, adanya proyek

yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, serta kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan normal.

Sesungguhnya dari aspek substansi hukum sudah ada aturan yang dengan jelas dan tegas mengatur tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Bahkan sudah ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan maraknya berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat publik termasuk di dalamnya kaum perempuan menunjukkan betapa tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut. Selain itu juga mengindikasikan semakin merosotnya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Permasalahan pokok yang menyebabkan adanya ketidaktertiban hukum karena adanya ketidaktertiban sosial. Dengan demikian berbicara permasalahan hukum akan bersangkut paut dengan kehidupan sosial dalam masyarakat, karena keduanya ada *pattern of interdependent relations*. Hukum yang baik harus dapat menyelesaikan kehidupan dalam masyarakat. Sebaliknya kejadian dalam masyarakat harus dapat dipergunakan sebagai *feedback* dalam menyusun sebuah aturan atau hukum.

Menyimak berbagai kasus tersebut perempuan harus bangkit, dan mampu mengembangkan kekuatan dari diri perempuan itu sendiri agar jauh dari ketergantungan, eksploitasi dan sub ordinasi, sehingga tidak rentan terhadap persoalan apapun termasuk kasus korupsi. Perempuan harus dapat berperan dengan menjaga keseimbangan antara tertib sosial dan tertib hukum agar tercipta masyarakat yang sejahtera sebagaimana tuntutan reformasi. ■

Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Sekretaris ISWI Surabaya



IKATAN  
SARJANA  
WANITA  
INDONESIA

Perempuan

SABTU PON, 10 MARET 2012